



LAPORAN PEYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2024

NO. IKK	IKK HASIL KELUARAN	RUMUS	TAHUN 2024		KETERANGAN
			CAPAIAN	SUMBER DATA	
1.c.3	Rasio Luas Daerah Irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani jaringan dan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani jaringan irigasi yang dibangun (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan dipelihara (ha) di tahun eksisting / Luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/kota	85,58%	Luas Irigasi Kewenangan Kabupaten /Kota Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi Yang Di Bangun (Ha),Ditingkatkan (Ha),Direhabilitasi (Ha), Dioperasikan Dan Pelihara (Ha) Di Tahun Eksisting	Penyesuaian verifikasi lapangan terkait Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Lombok Tengah oleh Kementerian PUPR Dirjen SDA
	1. Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik		40,56%	Data Kondisi Saluran Induk dan Sekunder Daerah Irigasi Tahun 2024	
	2. Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik		48,04%	Data Kondisi Saluran Induk dan Sekunder Daerah Irigasi Tahun 2024	
	3. Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik				Kewenangan/Tupoksi Dinas Pertanian
1.c.4	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	1. Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota.= 2. Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut.=	78,82%	(1). Data Akses Penyediaan Air Bersih Jaringan Perpipaan (Jp) Dan Bukan Jaringan Perpipaan (Bjp) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 (2). Surat dari Dinas Ketahanan Pangan dengan Nomor 5302/264/DKP/2023 tertanggal 6 November 2023 perihal Permintaan Data Dukung Indikator Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023	Penyesuaian Jumlah Penduduk berdasarkan data Jumlah Penduduk desa dan rumah tangga bersumber dari DUKCAPIL dan DP3AP2KB Kabupaten Lombok Tengah yang tertera pada Surat dari Dinas Ketahanan Pangan dengan Nomor 5302/264/DKP/2023 tertanggal 6 November 2023 perihal Permintaan Data Dukung Indikator Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 menyebabkan perubahan hasil perhitungan persentase rumah tangga yang terlayani air minum, walaupun secara jumlah terjadi peningkatan jumlah Rumah Tangga yang terlayani air minum.
	Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada /Tidak)		1	NA	
	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak)		1	NA	
	Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak)		1	NA	PDAM Tirta Artha Rinjani
	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM		NA	NA	
	Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain		NA	NA	
1.c.5	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	1. Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD = jumlah rumah di Kabupaten A =	88,18%	(1). Jumlah Rumah Yang Memiliki Akses Pengolahan Limbah Domestik Di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 (2). Laporan Progress Kegiatan DAK Sanitasi Tahun 2024 (3). Surat dari Dinas Ketahanan Pangan dengan Nomor 5302/264/DKP/2023 tertanggal 6 November 2023 perihal Permintaan Data Dukung Indikator Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023	Penyesuaian Jumlah Penduduk berdasarkan data Jumlah Penduduk desa dan rumah tangga bersumber dari DUKCAPIL dan DP3AP2KB Kabupaten Lombok Tengah yang tertera pada Surat dari Dinas Ketahanan Pangan dengan Nomor 5302/264/DKP/2023 tertanggal 6 November 2023 perihal Permintaan Data Dukung Indikator Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 menyebabkan perubahan hasil perhitungan persentase rumah tangga yang terlayani air minum, walaupun secara jumlah terjadi peningkatan jumlah Rumah Tangga yang terlayani air minum.
	1. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S		226025	Dokumen SSK	
	2. Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T		2898	Dokumen SSK	
	3. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T		228923	Dokumen SSK	

NO. IKK	IKK HASIL KELUARAN	RUMUS	TAHUN 2024		KETERANGAN
			CAPAIAN	SUMBER DATA	
	4. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja		7521 RT (2,75%)	Dokumen SSK	
	5. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja		7521 RT (2,75%)	Dokumen SSK	
	6. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik		7521 RT (2,75%)	Dokumen SSK	
	7. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar		NA	NA	NA
	8. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman		NA	NA	NA
	9. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman		NA	NA	NA
	10. Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat		NA	NA	NA
	11. Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja		NA	NA	NA
	12. Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja		NA	NA	NA
	13. Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD		NA	NA	NA
	14. Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja		7521 KK	Data Layanan Aman	NA
1.c.6	Rasio Kepatuhan IMB kab/kota	1. Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya = 2. Jumlah IMB yang berlaku =	100%	Monitoring Persetujuan Bangunan Gedung Tahun 2024	
	1. Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi)		336	SIMBG	NA
	2. Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting		375	SIMBG	NA
	3. Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)		Ada	Perda Kabupaten Lombok Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung	Terhapus/tidak digunakan semenjak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
	4. Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)		Ada	Keputusan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah Nomor 01/PU&PR/2024 Tentang Penetapan Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung Tahun 2024	
	5. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan		NA	NA	
	6. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi		NA	NA	
	7. Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota		NA	NA	
	8. Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat		1	DPA Tahun 2024 Sub Kegiatan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
1.c.7	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	1. Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap = 2. Jumlah total panjang jalan kabupaten kota =	70,36%	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota Di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024	
	1. Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK. Jalan Kewenangan Kab/Kota		810,80 Km	Draft SK Bupati Lombok Tengah (dalam proses di bagian Hukum)	
	2. Panjang jalan yang dibangun		-	-	
	3. Panjang jembatan yang dibangun				
	4. Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)		7,93 Km	-	
	5. Panjang jembatan diganti/dilebarkan				
	6. Panjang jalan direkonstruksi/direhabilitasi			-	
	7. Panjang jembatan yang direhabilitasi			-	
	8. Panjang jalan yang dipelihara		85 km		
	9. Panjang jembatan yang dipelihara		-		
1.c.8.1	Rasio Tenaga Operator/Teknis/Analis yang memiliki sertifikat kompetensi	1. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab./kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis = 2. Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota =	0,54	(1). Pelatihan Tenaga Jasa Konstruksi Pekerjaan Jalan Tahun 2024 (2). Pelatihan Tenaga Jasa Konstruksi Pekerjaan Gedung Tahun 2024	(1). Pelatihan Sertifikasi Kompetensi dilakukan bulan Agustus 2024 (Semester II) (2). Belum dilakukan perhitungan jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di Kabupaten Lombok Tengah
	1. Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota		54 orang	NA	
	2. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota		NA	NA	

NO. IKK	IKK HASIL KELUARAN	RUMUS	TAHUN 2024		KETERANGAN
			CAPAIAN	SUMBER DATA	
	3. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota		NA	NA	
	4. Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir		NA	NA	
	5. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota		NA	NA	
	6. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN		NA	NA	
	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.		NA	NA	
	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala				
	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota		Ada	NA	
	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya		NA	NA	
	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis		NA	NA	
	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota		NA	NA	
	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota		NA	NA	
	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui		NA	NA	
	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		NA	NA	
	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		NA	NA	
	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya				
	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota		NA	NA	
	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota		NA	NA	
	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota		NA	NA	
	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota		NA	NA	
	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui		NA	NA	
	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		NA	NA	
	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		NA	NA	

NO. IKK	IKK HASIL KELUARAN	RUMUS	TAHUN 2024		KETERANGAN
			CAPAIAN	SUMBER DATA	
	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		NA	NA	
1.c.8.2	Rasio Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi	1. Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa terjadi kecelakaan konstruksi = 2. Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya =	100%	Berita Acara Rapat Hasil Pengawasan dan Pelaporan Kegiatan tanpa Kecelakaan Konstruksi Periode Tahun 2024	
	1. Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah [kabupaten/kota]		54	Hasil Pengawasan dan Pelaporan Kegiatan tanpa Kecelakaan Konstruksi	
	2. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota		NA	NA	
	3. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota		NA	NA	
	4. Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir		NA	NA	
	5. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota		NA	NA	
	6. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Kabupaten/Kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN		NA	NA	
	7. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya		NA	NA	
	8. Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala		NA	NA	
	9. Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota		Ada		
	10. Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kejasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.		NA	NA	
	11. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis		NA	NA	
	12. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota		NA	NA	
	13. Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten A		NA	NA	
	14. Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui		NA	NA	
	15. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasan		NA	NA	
	16. Tersedianya data dan informasi kecelakaan koir.iink .1 pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		NA	NA	
	17. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		NA	NA	

NO. IKK	IKK HASIL KELUARAN	RUMUS	TAHUN 2024		KETERANGAN
			CAPAIAN	SUMBER DATA	
	18. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota				
	19. Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota		NA	NA	
	20. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota		NA	NA	
	21 . Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota		NA	NA	
	22. Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui		NA	NA	
	23. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		NA	NA	
	24. Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		NA	NA	
	25. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		NA	NA	
2.i.1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	1. Luas tanah sesuai peruntukkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) = 2. Seluruh Luas Tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) =	100%	Data Luas Tanah Di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Diterbitkan Tahun 2024	+
2.i.3	Tersedianya Lokasi Pembangunan dalam Rangka Penanaman Modal	1. Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai peruntukkan diatas KKPR 2. Luas tanah diatas KKPR yang diterbitkan	100%	Data Luas Tanah Yang Dimanfaatkan Sesuai Peruntukkannya Di Atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Diterbitkan Tahun 2024	

Praya, 6 Januari 2025
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,


ALU RAHADIAN, M.Si
 NIP. 196712311992031117